

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Proklamasi kemerdekaan yang berhasil dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak serta merta membawa Indonesia pada kondisi yang aman dan tenteram. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia perlu membenahi setiap sendi kehidupan yang menyangkut kesejahteraan rakyatnya. Dalam usaha untuk menata diri menjadi negara yang utuh, pada waktu yang bersamaan Indonesia harus pula menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Tantangan yang dihadapi tersebut meliputi dua dimensi, yakni politik dan militer. Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat menyebutkan bahwa rongrongan politik yang dihadapi Indonesia bersumber dari golongan komunis yang semakin menguat pengaruhnya (2015). Sedangkan tantangan dari dalam negeri yang berdimensi militer yaitu adanya pergolakan bersenjata di beberapa daerah seperti Peristiwa Madiun Tahun 1948, Peristiwa Darul Islam (DI) Tahun 1949 di Jawa Barat, Peristiwa Andi Aziz di Makasar, dan Proklamasi PRRI-Permesta di Sumatra Barat yang mengancam integritas nasional.

Begitupun dengan tantangan dari dalam negeri, Indonesia pun harus pula menghadapi rongrongan dari luar negeri. Seperti yang kita ketahui bahwa pada periode awal kemerdekaan Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Berbagai taktik dan usaha dilakukan Belanda sebagai upaya untuk kembali menduduki dan menguasai Indonesia. Dalam dimensi politik, sedikitnya Indonesia telah melakukan empat kali diplomasi sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatannya. Sedangkan dari dimensi militer, Ricklefs (2008, hlm.472) menyebutkan bahwa Belanda yang bersifat licik melakukan “aksi polisional” sebanyak dua kali yang kemudian dikenal dengan Agresi Militer I Belanda dan Agresi Militer II Belanda. Dimana, seperti yang disebutkan Poesponegoro dan Notosusanto (2008) bahwa agresi militer yang dilakukan Belanda tersebut berdampak pada kondisi sosial politik di Indonesia. Sebut saja pada Agresi Militer II Belanda, akibat yang ditimbulkan tidak lain adalah terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra yang

diketuai oleh Sjafruddin Prawiranegara karena didudukinya ibu kota Republik Indonesia yakni Yogyakarta.

Dari pengalaman agresi tersebut, para pemimpin militer Indonesia, dalam hal ini khususnya angkatan darat, sadar bahwa perlu dibentuk suatu organisasi militer yang dapat menjadi tentara *mobile* dan tentara teritorial. Lantara menegaskan bahwa secara kuantitas, TNI AD dan laskar saat itu sudah cukup besar namun dari segi kualitas terutama mengenai latihan dan perlengkapan militernya masih sangat kurang (2009). Maka, setelah pengakuan secara resmi yang diberikan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia mulai berbenah dalam urusan organisasi militer, termasuk diantaranya Angkatan Darat (Ricklefs, 2008, hlm. 488). Salah satu perubahan mendasar setelah adanya pengakuan tersebut adalah restrukturisasi dalam tubuh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat – selanjutnya disebut APRIS – (Djamhari, 1971, hlm. 53). Hal ini tidak lain berkaitan dengan isi perjanjian yang disepakati pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Sesuai dengan kesepakatan tersebut, maka pasukan-pasukan Belanda harus ditarik dari Indonesia secara bertahap dan tanggung jawab keamanan harus diserahkan sepenuhnya kepada APRIS (Djamhari, 1971, hlm. 53). Dengan demikian, Organisasi Militer Indonesia harus menata diri dan menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan keamanan demi menjaga kedaulatan negara.

Kondisi organisasi militer Indonesia pada awal kemerdekaan disebutkan Mardjiono (1993, hlm. 2) sebagai berikut:

... sesuai ketetapan Struktur Organisasi dan Tugas Penetapan (TAP) 0-5 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Agustus 1958 bahwa setiap wilayah Indonesia dibentuk Komando-komando Daerah Militer (Kodam) yang membawahi Komando Resort Militer (Korem), Kesatuan-kesatuan Brigade, dan Batalyon-batalyon.

Berdasarkan isi ketetapan tersebut maka pentingnya membentuk suatu organisasi militer di tingkat nasional sangat diperlukan. Hal ini tidak lain karena pada awal kemerdekaan organisasi militer Indonesia masih berbasis teritorial atau berdasarkan pada pembagian wilayah. Terbentuknya organisasi militer berdasarkan teritorial ini berangkat dari pengalaman dalam menumpas DI/TII di Jawa Tengah (Lantara, 2009). Selain berkaca pada peristiwa tersebut, organisasi

militer lainnya pun terbentuk sebagai refleksi dari pengalaman dalam menumpas peristiwa-peristiwa lainnya, misalnya saja peristiwa di Ambon. Organisasi militer yang berhasil dibentuk adalah Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) dimana sifatnya sebagai kesatuan tempur khusus yang langsung berada dibawah komando Kepala Staf Angkatan Darat. Namun, sayangnya kesatuan ini masih setingkat dengan resimen dan tidak dapat digerakkan dalam kesatuan setingkat brigade ke atas. Selain itu, hal ini diperkuat dengan kondisi sosial politik Indonesia yang pada saat itu belum stabil sehingga menyebabkan banyak terjadinya perlawanan-perlawanan.

Perlawanan-perlawanan yang terjadi diberbagai daerah tidak lain merupakan bentuk kekecewaan dan rasa tidak setuju dari rakyat atas keputusan pemerintah Indonesia untuk membentuk negara kesatuan di bawah Republik Indonesia. Hal ini berkaitan dengan adanya keinginan dari negara-negara federal untuk membubarkan diri dan bergabung dengan republik. Namun, keinginan tersebut tidak datang dari semua negara federal, melainkan hanya perwakilan saja. Sehingga, hal tersebut berdampak pada munculnya oposisi-oposisi dari negara-negara Sumatra Timur dan Indonesia Timur terhadap gerakan persatuan (Ricklefs, 2008, hlm. 489). Negara-negara yang tergabung sebagai oposisi tersebut beranggapan bahwa Republik didominasi oleh orang-orang Jawa, kaum muslim, dan mereka memandang tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan republik sebagian besar orang-orang yang berhaluan kiri.

Atas dasar pertimbangan tersebutlah kemudian Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) mengeluarkan Surat Keputusan No. Kpts-1067/12/1960 mengenai pembentukan CADUAD (Cadangan Umum Angkatan Darat) yang kemudian berganti nama menjadi Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau lazim disebut KOSTRAD (Mardjiono, 1993, hlm. 5). Tugas utama KOSTRAD tidak lain adalah menjawab setiap ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Tugas tersebut berkaitan dengan pembinaan atas kesiapan operasional segenap jajaran komando dalam menyelenggarakan operasi pertahanan tingkat strategis sesuai dengan kebijaksanaan Panglima TNI (Tn, 2009). Secara terperinci, tugas pokok tersebut tentu saja erat kaitannya dengan urusan menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Dimana, hal tersebut sejalan dengan latar belakang berdirinya

KOSTRAD yang tidak lain merupakan jawaban atas permasalahan Irian Barat yang tidak kunjung menemui penyelesaian sejak diakuinya kedaulatan Indonesia secara penuh oleh Belanda. Maka, sesuai dengan latar belakang pembentukan tersebut, Ridhani menegaskan bahwa CADUAD merupakan satuan-satuan *mobile* yang selalu siap tempur walaupun dalam keadaan darurat (2009, hlm. 95). Pada awal pembentukannya, KOSTRAD telah mampu memenuhi tujuan tersebut. Dominique menegaskan bahwa KOSTRAD telah berhasil dalam beberapa operasi mempertahankan keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), diantaranya dalam Operasi Mandala atau dikenal juga dengan Operasi Trikora yang tidak lain merupakan usaha untuk merebut Irian Barat dari Belanda, Operasi Dwikora, dan Operasi penumpasan Partai Komunis Indonesia (2012, hlm. 5).

Berdirinya suatu organisasi, terlebih lagi organisasi militer, tentu membutuhkan hadirnya sosok pemimpin. KOSTRAD yang pada saat itu baru dibentuk membutuhkan pemimpin yang tegas, lugas, dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap negara dan tentunya terhadap kesatuan. Kebutuhan akan sosok pemimpin dengan kriteria tersebut tidak lain berkaitan dengan tujuan dan tugas berat yang akan diemban KOSTRAD. Dengan pertimbangan tersebut, akhirnya Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Jenderal A. H. Nasution, memilih Brigadir Jenderal Soeharto (Roeder, 1969, hlm. 168). Terpilihnya Soeharto sebagai panglima pertama KOSTRAD sejalan dengan perjalanan panjang Republik Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan kedaulatan yang berliku dan penuh dengan rintangan.

Sejarah mencatat, selama periode tersebut Soeharto banyak berkontribusi dalam menjaga kedaulatan Indonesia demi kelangsungan kehidupan rakyat, utamanya berkaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan. Pengalaman beliau yang sudah malang melintang dalam dunia militer Indonesia dan atas prestasi yang beliau torehkan demi tanah air tercinta menjadi salah satu pertimbangan Jenderal A. H. Nasution. Roeder menyebutkan bahwa Soeharto terlibat dalam beberapa peristiwa mempertahankan kedaulatan Indonesia, diantaranya adalah pada Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Penumpasan Peristiwa Andi Aziz di Sulawesi Selatan (1969, hlm. 156 – 161).

Atas dasar perjalanan panjang tersebutlah, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti perkembangan KOSTRAD pada awal pembentukannya di bawah komando Brigadir Jenderal Soeharto dengan kurun waktu mulai dari tahun 1961 hingga 1965. Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai perjuangan KOSTRAD dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia yang saat itu terkepung oleh berbagai ancaman integritas. Dalam hal ini, penulis ingin memperdalam bagaimana kemudian KOSTRAD sebagai kesatuan yang baru dibentuk dapat bertahan dalam keadaan tersebut. Terlebih lagi, pada rentang waktu empat tahun tersebut, KOSTRAD telah mampu menorehkan prestasi besar melalui keterlibatannya dalam operasi-operasi menjaga kedaulatan Republik Indonesia.

Selain hal di atas, ketertarikan lain dari penulis akan topik yang dikaji adalah berkaitan dengan kedudukan Soeharto itu sendiri. Posisi beliau sebagai pemimpin tertinggi KOSTRAD tentu saja memiliki pengaruh terhadap kesatuan yang dipimpinnya. Kemudian, alasan pemilihan kurun waktu yang penulis tentukan berkaitan dengan keluarnya Surat Keputusan No. KPTS-54/3/1961 mengenai disahkannya kesatuan CADUAD (Ridhani, 2009, hlm. 96). Sedangkan alasan pemilihan kurun waktu yang diakhiri pada tahun 1965 tidak lain berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Brigadir Jenderal Soeharto sebagai Panglima KOSTRAD yang pertama.

Oleh karena keberhasilan-keberhasilannya dalam melaksanakan operasi-operasi besar demi menjaga kedaulatan Republik Indonesia dan kemampuannya bertahan sebagai kesatuan yang baru dibentuk dan dapat menunjukkan profesionalitasnya, penulis tertarik untuk mengkaji perkembangan kesatuan ini yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah dengan judul “*Perkembangan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD): Kajian Historis Tahun 1961 – 1965*”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah utama dari penelitian ini adalah “Bagaimana Perkembangan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD) Pada Tahun 1961 - 1965?”. Namun, dengan tujuan untuk memfokuskan pembahasan masalah, penulis merumuskan kembali pertanyaan-pertanyaan penelitian secara rinci sebagai berikut:

Cicik Ninawati, 2017

PERKEMBANGAN KOMANDO CADANGAN STRATEGIS ANGKATAN DARAT (KOSTRAD) : KAJIAN HISTORIS TAHUN 1961 - 1965

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Bagaimana proses pembentukan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD) sebagai kesatuan siap tempur ?
2. Bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Brigadir Jenderal Soeharto dalam mengembangkan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD) pada tahun 1961 – 1965 ?
3. Bagaimana prestasi yang berhasil dicapai Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD) pada tahun 1961 – 1965 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian secara umum adalah mengetahui bagaimana Perkembangan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD) Pada Tahun 1961 - 1965, sedangkan tujuan khususnya dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis proses pembentukan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD) sebagai kesatuan siap tempur.
2. Menganalisis kebijakan yang dikeluarkan oleh Brigadir Jenderal Soeharto dalam mengembangkan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD) pada tahun 1961 – 1965 .
3. Mengeksplorasi prestasi yang berhasil dicapai Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD) pada tahun 1961 – 1965.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun harapan penulis dari hasil penelitian ini adalah adanya kebermanfaatan bagi semua pihak, khususnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan sejarah, terutama mengenai perkembangan organisasi militer KOSTRAD. Maka, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memperkaya tulisan mengenai sejarah militer angkatan darat, khususnya Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD).
2. Memperkaya pemahaman mengenai salah satu tokoh yang berpengaruh dalam sejarah militer Indonesia.
3. Memberikan pengetahuan dan referensi pada satuan pendidikan terutama hal yang berhubungan dengan sejarah kekuatan militer Indonesia.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Berdasarkan pedoman penulisan karya tulis ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tahun 2016, maka struktur organisasi skripsi yang berjudul “Perkembangan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD): Kajian Historis Tahun 1961 – 1965” ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada BAB ini akan dipaparkan masalah dan alasan penulis memilih kajian mengenai perkembangan satuan KOSTRAD dibawah pada kurun waktu Tahun 1961 – 1965. Selain latar belakang penelitian, pada BAB I ini di dalamnya terdapat Sub BAB lainnya, diantaranya adalah Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Struktur Organisasi Skripsi.

BAB II Kajian Pustaka, BAB ini akan memaparkan mengenai buku-buku ataupun sumber penelitian lainnya yang menjadi sumber utama penulis dalam melakukan penelitian mengenai Perkembangan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD): Kajian Historis Tahun 1961 – 1965. Sumber tersebut diantaranya berupa buku, hasil penelitian sebelumnya, baik berupa skripsi maupun jurnal, serta sumber internet yang dianggap relevan yang tentunya disesuaikan dengan kajian yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian, dalam BAB ini penulis memaparkan mengenai metode atau proses yang dilaksanakan dalam melakukan penelitian. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode historis dan teknik studi literatur dalam pengumpulan sumbernya. Proses penelitian disesuaikan dengan Pedoman Karya Tulis Ilmiah UPI Tahun 2016 dan berdasarkan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

BAB IV, KOSTRAD: Perkembangan dan Peranannya dalam Menjaga Kedaulatan Republik Indonesia Tahun 1961 – 1965, BAB ini akan memaparkan hasil penelitian yang didasarkan atas data dan fakta yang diperoleh selama penelitian dilakukan mengenai Perkembangan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD): Kajian Historis Tahun 1961 – 1965. Dalam BAB ini akan dipaparkan mengenai Proses Pembentukan KOSTRAD Sebagai Kesatuan Siap Tempur yang di dalamnya membahas mengenai kondisi politik militer Indonesia menjelang tahun 1961, kondisi keamanan Indonesia menjelang tahun 1961, proses pembentukan Cadangan Umum Angkatan Darat (CADUAD)

sebagai Cikal Bakal KOSTRAD, dan profil tokoh utama dalam penelitian ini yakni Brigadir Jenderal Soeharto sebagai Panglima KOSTRAD yang pertama. Kemudian, pembahasan selanjutnya memaparkan mengenai Kebijakan Brigadir Jenderal Soeharto dalam Mengembangkan KOSTRAD meliputi kebijakan dalam hal struktur organisasi, rekrutmen personil, kelengkapan logistik, dan ketentuan Pataka sebagai identitas KOSTRAD. Sedangkan pembahasan terakhir memaparkan mengenai hasil analisis atas Prestasi yang berhasil dicapai KOSTRAD di bawah Kepemimpinan Brigadir Jenderal Soeharto meliputi keberhasilan dalam Operasi Mandala di Irian Barat, Operasi Dwikora, dan Penyelesaian Gerakan 30 September 1965.

BAB V Simpulan dan Rekomendasi, BAB ini merupakan pembahasan terakhir dimana penulis memberikan suatu kesimpulan dari hasil interpretasi terhadap kajian penelitian. Interpretasi penulis ini disertai dengan analisis penulis dalam membuat kesimpulan atas jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam suatu rumusan masalah. Selain itu, di dalam BAB ini pun dipaparkan saran dari penulis yang diajukan kepada berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini.